

**STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KARET
DALAM PRESPEKTIF PERANAN KELEMBAGAAN DI
INDONESIA**

***DEVELOPMENT STRATEGY OF RUBBER AGRIBUSINESS IN THE
PERSPECTIVE OF INSTITUTIONAL ROLE IN INDONESIA***

SITI RAMADANI ANDELIA^{1*}, MIRZA ANTONI², DESSY ADRIANI³

Fakultas Pertanian, Pascasarjana Universitas Sriwijaya

*05022682125006@student.unsri.ac.id

ABSTRAK

Karet sebagai komoditas ekspor memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Harga karet yang fluktuatif dan menurun dapat memengaruhi produksi karet nasional maka diperlukan strategi pengembangan agribisnis karet. Untuk menjaga kontinuitas dan kualitas karet maka tujuan dalam makalah ini adalah (1) Mengetahui urgensi eksistensi kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian di Indonesia; (2) Mengkaji kondisi dan daya saing karet di Indonesia (3) Mengidentifikasi permasalahan agribisnis karet di Indonesia; (4) Strategi dalam pengembangan karet melalui kelembagaan untuk mewujudkan petani yang sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literature review yang kemudian dianalisis dengan metode sistematik literary review. Hasil dari penelitian ini adalah kelembagaan petani diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Keberadaan kelembagaan petani dapat menjadi wadah dalam aktivitas bersama dengan kebersamaan tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kelembagaan dalam agribisnis karet adalah koperasi, lembaga unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB), kelompok tani dan GAPOKTAN, penyuluh pertanian serta asosiasi. Strategi pengembangan karet di sektor hilir dilakukan dengan mengembangkan sistem kemitraan antara perusahaan dan petani sehingga dihasilkan produksi karet dengan produktivitas yang tinggi dan kualitas yang baik, penguatan pemodal, dan pengembangan ilmu industri karet.

Kata Kunci : Karet, Kelembagaan, Strategi, Kesejahteraan Petani

ABSTRACT

Rubber as an export commodity has an important role in the national economy. Fluctuating and declining rubber prices can affect national rubber production, so a rubber agribusiness development strategy is needed. To maintain the continuity and quality of rubber, the objectives of this paper are (1) to know the urgency of the existence of farmer institutions in agricultural development in Indonesia; (2) Assessing the condition and competitiveness of rubber in Indonesia (3) Identifying rubber agribusiness problems in Indonesia; (4) Strategy in rubber development through institutions to create prosperous farmers. The method used in this study is a literature review which is then analyzed by a systematic literary review method. The result of this research is that farmer institutions are expected to be able to support agricultural development and increase farmer welfare. The existence of farmer institutions can be a forum for joint activities with togetherness that will be more effective in achieving the desired goals together. Institutions in rubber agribusiness are cooperatives, bokar marketing and management unit institutions (UPPB), farmer groups and GAPOKTAN, agricultural extension workers and associations. The rubber development strategy in the downstream sector is carried out by developing a partnership system between companies and farmers so that rubber production is produced with high productivity and good quality, strengthening capital, and developing rubber industry knowledge.

Keywords: Rubber, Institutional, Strategy, Farmer Welfare

PENDAHULUAN

Peluang komoditas karet sangat menjanjikan karena bahan baku karet sintetis yang semakin terbatas, kebutuhan karet alam semakin meningkat, dan karet alam Indonesia memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh industri ban dan berbagai jenis industri berasal karet lainnya (Direktorat Jendral Perkebunan, 2021). Perkebunan karet alam Indonesia yang masih dominan berupa perkebunan rakyat berperan sebagai sumber pendapatan bagi petani karet alam maupun pelaku ekonomi lainnya

Mendasarkan pada orientasi pembangunan pertanian di Indonesia saat ini yang mendasarkan pada sistem agribisnis maka peranan kelembagaan pertanian, termasuk didalamnya kelembagaan petani, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani; aksesibilitas pada informasi pertanian; aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar; dan adopsi inovasi-inovasi pertanian (Anantanyu, 2011). Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani.

Agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dari beberapa subsistem, yaitu: (1) subsistem pengadaan sarana produksi pertanian, (2) subsistem produksi usahatani, (3) subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian (agroindustry), (4) subsistem pemasaran hasil pertanian, dan (5) subsistem penunjang kegiatan pertanian (Arifin dan M. Arsyad Biba, 2017). Pembangunan pertanian tidak hanya terhadap aspek-aspek yang berada dalam subsistem *on farm* saja tetapi harus melalui aspek-aspek *off farm* secara integratif sehingga agribisnis merupakan sistem yang memiliki lingkup lebih luas dibandingkan dengan pertanian dalam arti luas (Pratama, 2016).

Keberhasilan berjalannya sistem Agribisnis Jasa-jasa ini disediakan oleh pemerintah, asosiasi, kredit dan pembiayaan agribisnis, lembaga penelitian, kelompok tani dan koperasi. Subsistem penunjang terdiri atas semua pemain utama yang menyediakan jasa, meskipun bersifat pilihan, namun sangat penting dalam menunjang keberhasilan berjalannya sistem agribisnis.

Kontribusi utama kelembagaan dalam pembangunan agribisnis adalah mengkoordinasikan, mengendalikan, atau mengontrol interdependensi antar

partisipasi (tenaga kerja, capital, management, dan lain-lain) dalam proses transformasi dari input menjadi output. Upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani dilakukan melalui pengembangan kelembagaan pertanian, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas kelembagaan petani. Kenyataan menunjukkan bahwa program-program pembangunan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil secara individu yang jumlahnya sangat banyak.

Kelembagaan yang menaungi bagian yang paling penting dalam pelaksanaan pertanian yakni petani diyakini dapat menjadi wadah persatuan bagi petani dalam mencapai tujuan bersama agar lebih sejahtera. Penelitian ini pening untuk memberikan informasi dalam melihat (1) Urgensi eksistensi kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian di Indonesia; (2) Mengkaji Kondisi dan Daya Saing Karet di Indonesia (3) Mengidentifikasi Permasalahan Agribisnis Karet di Indoensia; (4) Strategi dalam pengembangan karet melalui kelembagaan untuk mewujudkan petani yang sejahtera.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *literature review* dari jurnal nasional maupun internasional yang

kemudian sumber bacaan yang telah diperoleh (Prasetyo, 2017). Kemudian, dianalisis dengan metode sistematik *literature review* yang meliputi pengumpulan, evaluasi, dan pengembangan penelitian dengan focus tertentu dalam sebuah penelitian .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Empiris

Penelitian Daya Saing Karet Alam Sumatera Selatan dalam Perdagangan Internasional bertujuan untuk menganalisis kondisi dan daya saing komoditi karet alam Sumatera Selatan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pada periode tahun 2015-2019 dan wawancara yang mendalam dengan. Metode analisis data menggunakan konsep daya saing dan teori keunggulan kompetitif oleh Michael Porter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas karet alam Sumatera Selatan memiliki daya saing yang rendah dinilai dari beberapa faktor. Faktor-faktor itu, adalah: kondisi perkebunan dan sumberdaya manusia yang tidak terkelola dengan baik, penjualan hanya terbatas pada karet mentah dan karet setengah jadi, permintaan pasar menurun setiap tahunnya, (Hertina *et al*, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Agus Santoso Tahun 2018 berjudul permasalahan pengembangan

karet di Indonesia antara harapan dan kenyataan. Ada empat poin dalam melihat permasalahan karet di Indonesia, antara lain: (1) rendahnya produktivitas, karena kurangnya perhatian pihak terkait di bidang penelitian dan pengembangan (litbang) tanaman karet. (2) Program revitalisasi yang bertujuan memberikan bantuan untuk petani mengakses pendanaan, faktanya masih kurangnya dukungan dari berbagai pihak sehingga program berjalan setengah-setengah. Kendala utama yang dihadapi petani selama ini terlihat jelas karena tidak adanya sertifikat tanah milik petani untuk agunan ke bank. (3) Penyebab rendahnya produktivitas tanaman termasuk petani karet, karena penggunaan benih atau bibit yang tidak unggul. Selain itu petani belum menguasai teknik dan tata cara budidaya karet yang benar dan baik. Apalagi dalam penguasaan teknologi penyadapan, kemampuan petani juga sangat minim. (4) Permasalahan terakhir, dimana lokasi perkebunan rakyat yang tersebar dalam skala areal yang relatif kecil dengan akses yang terbatas, sehingga biaya angkut menjadi tinggi dan kurang efisien. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan memperluas areal tanam petani perkebunan rakyat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan

menelusuri sumber-sumber terdahulu (Santoso, 2018).

Pengembangan industri hilir karet alam Provinsi Riau maupun di Indonesia cenderung stagnan dan menghadapi masalah yang sangat serius karena sistem insentif dan pengawasan yang lemah terhadap perkebunan karet rakyat untuk menghasilkan produk-produk karet berkualitas. Secara umum makalah ini bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang strategi pengembangan industri hilir karet alam di Provinsi Riau. Secara spesifik bertujuan untuk menggambarkan potensi pengembangan industri hilir, dan merumuskan strategi pengembangan industri karet alam di Provinsi Riau. Jenis Penelitian adalah eksploratif yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan dalam menyusun strategi kebijakan. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan. Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa tingginya potensi pengembangan industri hilir karet alam di Provinsi Riau yang diperlihatkan oleh tingginya daya dukung wilayah, dan permintaan terhadap produk-produk hilir karet sangat tinggi dan cenderung meningkat. Tiga strategi pokok perlu diimplementasikan dalam

pengembangan industri hilir karet di Provinsi Riau. Pertama, memperkuat pengembangan hulu-hilir industri karet alam, yakni menggalakkan kembali sistem kemitraan antara perusahaan dan petani, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara yang dihasilkan dalam jangka pendek, dan mendorong pengembangan industri hilir karet yang mampu menghasilkan produk-produk akhir yang bernilai tambah tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Kedua, mempercepat pembangunan kluster industri karet alam melalui pengembangan kawasan industri Plintung Dumai, Kuala Enok dan Buton. Ketiga, menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, melalui peningkatan peringkat kemudahan melakukan usaha (Bakce *et al*, 2017).

Penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Usahatani Karet Di Kabupaten Kuantan Singingi membahas mengenai strategi pengembangan. Ada 2 Jenis sistem usahatani karet yang diterapkan oleh petani karet di Kuantan Singingi, yaitu konvensional dan lelang. Petani konvensional adalah petani yang memasarkan bokar langsung ke toke (besar pedagang). Petani sistem lelang merupakan kelompok yang tergabung dalam paguyuban petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi. Masalah utama yang

dihadapi petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi secara konvensional petani adalah harga masih dalam kendali toke (Indialis *et al*, 2021). analisis AWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus strategi pengembangan sistem usahatani karet adalah dengan kekuatan (internal) usahatani dengan memanfaatkan peluang yang ada (eksternal) sehingga strategi yang relevan dapat diimplementasikan untuk pengembangan sistem pertanian karet dalam sistem lelang di Kuantan Kabupaten Singingi.

Strategi Pengembangan Agribisnis Karet Rakyat di Kabupaten Nias Selatan merupakan penelitian yang dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kepustakaan studi untuk analisis kuantitatif data sekunder dan data primer yang dikumpulkan untuk instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan. Hasil analisis faktor strategis internal terdiri dari: 1) faktor daya: ketersediaan lahan, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, kesuburan tanah yang baik untuk karet. 2) Faktor kelemahan, tidak ada karet pabrik, harga karet masih rendah, tidak ada program peremajaan, petani dan rendah modal. Faktor strategis eksternal di Nias Selatan terdiri dari 1) Faktor odds: ekspor tinggi permintaan, perluasan lahan masih tersedia, komitmen yang kuat dari lokal

pemerintah, penggunaan lahan dan tidak memerlukan teknologi tinggi terlantar. 2) ancaman konversi lahan, petani beralih ke sektor lain, perubahan iklim, hama dan penyakit dan penebangan dini pohon karet produktif. Strategi alternatif untuk pengembangan karet di Nias Selatan adalah: 1) Membentuk kelompok tani sebagai sarana penyuluhan, pendidikan, pengenalan teknologi dan akses permodalan. 2) Modal untuk petani. 3) program peremajaan klon tua unggul. 4) Memanfaatkan otonomi anggaran untuk meningkatkan produksi karet kebutuhan industri. 5) Kerjasama dengan investor untuk membangun pabrik pengolahan karet. 6) peningkatan teknologi budidaya karet. 7) Memperluas perkebunan karet. 8) Menggalakkan penggunaan bibit (klon) unggul. (Ujianhati *et al*, 2014).

Berdasarkan analisis empiris dari ke-5 (lima) penelitian terdahulu, strategi yang dihasilkan dari berbagai macam daerah dan permasalahan memiliki hasil strategi yang berbeda-beda dan ada pula yang sama. Maka dari itu dapat disimpulkan beberapa strategi yang sering disarankan dari beberapa artikel ilmiah dalam pembangunan agribisnis karet di Indonesia.

Kondisi Karet di Indonesia

Beberapa kajian empiris mengenai latar belakang artikel menyebutkan bahwa serapan karet alam untuk industri hilir adalah 18,71% dari total produksinya, 50% di antaranya oleh industri ban, 15% oleh industri sarung tangan, dan 35% oleh industri lainnya (benang karet, alas kaki, vulkanisir ban, sarung tangan, karpet, dan lainnya). Dari data tersebut terlihat bahwa industri hilir karet masih sangat minim untuk menyerap produksi karet Indonesia. Selain itu industri hilir karet masih terpusat di Pulau Jawa. Industri karet secara garis besar terdiri atas dua kelompok yaitu, (1) kelompok industri yang menghasilkan crumb rubber (karet remah), Sheet/RSS (*ribbed smoked sheet*), lateks pekat, thin pole crepe, dan brown crepe; (2) kelompok industri hilir memproduksi barang jadi karet untuk keperluan industri seperti dikemukakan sebelumnya, barang karet untuk kemiliteran, alas kaki dan komponennya, barang jadi karet berupa ban, barang jadi karet untuk penggunaan umum, serta alat kesehatan dan laboratorium.

Arti Penting Kelembagaan Petani dalam Pembangunan Pertanian

Berdasarkan kajian empiris dan kajian teoritis bahwa kelembagaan memiliki peran yang sangat penting pembangunan. Tentunya di Indonesia

masih memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi lembaga salah satunya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Untuk itu perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa: (a) Proses pertanian memerlukan sumberdaya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya; (b) Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi; (c) Kegiatan pertanian mencakup tiga rangkaian: penyiapan *input*, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan *output* menjadi berharga; (d) Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal; dan (e) Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal.

Dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, proses produksi, sampai dengan pengolahan hasil diperlukan kelembagaan petani. Kegiatan usaha pertanian akan berhasil jika petani mempunyai kapasitas

yang memadai. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman mengenai suatu kelembagaan di tingkat petani. Secara tradisional, kelembagaan masyarakat petani sudah berkembang dari generasi ke generasi, namun tantangan jaman menuntut suatu kelembagaan yang lebih sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Kelembagaan petani yang efektif ini diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian. Keberadaan kelembagaan petani Aktivitas bersama sangat diperlukan apabila dengan kebersamaan tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Koperasi Petani Karet

Pembangunan Agribisnis karet tidak terlepas dari penerapan koperasi sesuai dengan kajian toritis. Namun, keberadaan koperasi di Indonesia salah satunya di wilayah BPP Kayuara yang belum sepenuhnya berfungsi bagi warga masyarakat dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga sekitar (Sutanto et al., 2020). Penyebabnya karena masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari koperasi itu sendiri. Masyarakat juga hanya mengetahui satu

fungsi koperasi yaitu untuk memberikan bantuan modal dalam bentuk uang. Padahal terdapat beberapa fungsi lainnya dari koperasi, diantaranya yaitu untuk mengembangkan potensi warga masyarakat dan daerah sekitar, serta dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi anggota koperasi dan juga masyarakat secara umum. Berdasarkan situasi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang keberadaan dan fungsi koperasi, dengan tujuan agar para petani kopi dan karet dapat memanfaatkan keberadaan koperasi tersebut secara optimal.

Salah satu contoh usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan petani yakni misalnya pelatihan dilaksanakan pada saat masa pandemi COVID -19, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, melainkan dengan metode virtual dengan bantuan aplikasi zoom. Pelatihan merupakan kerjasama antara BPP kayuara dengan narasumber yang diminta untuk memberi materi sesuai dengan surat permintaan yang terlampir sebagai berikut

Lembaga Pemerintah dalam Peremajaan Karet

Hasil penelitian ke-2 yang terdapat dalam kajian Empiris merekomendasikan bahwa pemerintah beserta seluruh aspek yang terkait mendorong terciptanya suatu lingkungan yang dapat mengoptimalkan kinerja karet nasional. Salah satu langkah yang dapat mendorong peningkatan produksi adalah peremajaan lahan karet yang sebagian besar telah memasuki tahapan tidak produktif (tanaman berusia di atas 20 tahun) di samping tetap melakukan perluasan lahan. Berdasarkan teori pemerintah bertanggung jawab dalam memfasilitasi peremajaan karet namun masih terdapat kendala sehingga pemerintah belum dapat mewujudkan sepenuhnya rencana revitalisasi. Strategi peremajaan lahan karet dinilai cukup baik dengan luas lahan karet saat ini mencapai 3,4 juta hektar sehingga apabila lahan tersebut dioptimalkan melalui peremajaan diharapkan tingkat produksi akan meningkat sekitar 20-30%.

Permasalahan dalam revitalisasi perkebunan yang dihadapi Indonesia adalah (1) kesejahteraan petani masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi, (2) keberadaan kelembagaan petani dan penyuluhan makin lemah, (3) lahan pengusahaan makin sempit sehingga

pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi keperluan dan kurang mendorong upaya peningkatan produksi, (4) akses petani ke sumber daya produktif masih sangat terbatas, (5) sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perkebunan yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk perkebunan masih rendah.

Lembaga Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)

Perlunya kelembagaan petani untuk mengatasi rendahnya kualitas karet petani, mengatasi tekanan harga tauke serta panjangnya rantai pemasaran karet menyebabkan pemasaran karet tidak efektif. Berdasarkan kajian teori bahwa terdapat program pemerintah dalam memperbaiki strategi pemasaran karet yang perlu dilakukan antara lain perbaikan aspek kualitas karet petani, penguatan kelembagaan pasar lelang menjadi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (UPPB), serta dukungan pemerintah daerah berkaitan dengan pembinaan dan regulasi karet di Rokan Hulu (Syafendi, 2013).

Indonesia memiliki 3,1 juta hektar areal petani karet pada tahun 2017 (Dirjen Perkebunan, 2017), yang memperkirakan bahwa 31.000 UPPB dapat didirikan.

Padahal, hingga saat ini baru 1,25% UPPB potensial yang telah tercipta. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak petani kecil yang menjual melalui jalur non-UPPB, terutama dalam sistem pemasaran tradisional. Namun, banyak penelitian menemukan bahwa pendapatan, harga, dan efisiensi saluran pemasaran UPPB lebih menguntungkan bagi petani kecil daripada saluran pemasaran non-UPPB (Nurhamlin, 2018; Syarifa et al., 2016).

Tingginya harga bahan karet di UPPB menjadi daya tarik terbesar bagi petani karet untuk menjadi anggota UPPB. Hal ini membuktikan bahwa UPPB dapat meningkatkan harga karet karena kualitas bahan karet dan posisi tawar yang kuat antara pekebun dengan tengkulak. Peningkatan kualitas karet disebabkan penerapan standar pengolahan di tingkat petani, seperti penggunaan koagulan yang direkomendasikan, serta tidak mengeringkan bahan karet atau terkena sinar matahari langsung, tidak merendamnya dalam air, dan tidak mengandung kontaminan. Posisi tawar meningkat karena penjualan dilakukan melalui lelang atau kemitraan. Dengan sistem lelang, penawar dengan harga tertinggi akan menang, sedangkan dengan sistem kemitraan petani dapat mempersingkat rantai pemasaran karena

menjual langsung ke pabrik karet remah. Dua alasan lain yang cukup signifikan menyebabkan petani memilih jalur pemasaran UPPB adalah kemudahan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan jarak rumah petani dengan tempat pelelangan. Pemerintah tidak memberikan bantuan kepada petani kecil secara individu tetapi kepada petani yang tergabung dalam organisasi petani seperti UPPB. Jarak rumah petani ke UPPB menjadi alasan terbesar ketiga karena petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membawa bahan karet ke tempat pelelangan. Kantor UPPB digunakan sebagai tempat lelang. Namun jika petani menjual menggunakan pemasaran tradisional, maka tengkulak datang ke petani sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Alasan terbesar petani tidak menjadi anggota UPPB adalah karena mereka sudah memiliki pelanggan (tengkulak tetap). Alasan ini juga berkaitan dengan alasan terbesar kedua, bahwa petani terlilit hutang kepada tengkulak tersebut. Perantara ini biasanya juga seorang rentenir. Alasan lain banyak petani kecil tidak bergabung dengan UPPB adalah kinerja UPPB. Beberapa UPPB belum memberikan pelayanan yang sangat memuaskan bagi anggota karena belum dilaksanakannya kegiatan khusus, terutama

di UPPB yang relatif baru berdiri. Keterbatasan layanan ini disebabkan minimnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah (Antoni & Tokuda, 2019).

Penyuluh Pertanian

Usaha peningkatan harga bokar diawali dengan pembentukan beberapa kelompok pemasaran bokar secara bersama yang dilakukan dengan sistem lelang disentra produksi karet, untuk pengembangan kelompok tersebut perlunya kinerja penyuluh yang tinggi terhadap berkembangnya kelompok binaannya (Hutahaean et al., 2016; Rosnita, n.d.). Namun pengembangan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi kinerja penyuluh diantaranya yaitu pengetahuan, keterampilan, motivasi, jarak tempat tinggal, dan fasilitas, sehingga sekaligus akan mempengaruhi tingkat keberhasilan petani atau kelompoktani dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan kajian tentang: “Hubungan Kinerja Penyuluh Pertanian Terhadap Keberhasilan Petani dalam Mengembangkan Kelompok Pemasaran Bersama Bahan Olahan Karet Rakyat (Bokar) di Kabupaten Kuantan Singing.

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Strategi pengembangan usahatani sistem pemasaran lelang yang ditempuh adalah meningkatkan sumberdaya manusia dalam upaya meningkatkan teknologi dan

mutu karet yang dihasilkan serta meningkatkan kemampuan dan status lembaga dalam upaya menjalin kemitraan dan harmonisasi hubungan dengan lembaga industri karet.

Strategi pengembangan usahatani sistem pemasaran konvensional yang ditempuh adalah meningkatkan sumberdaya manusia petani melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu memiliki organisasi kelembagaan (kelompok tani dan gapoktan) yang mampu memberikan permodalan dan mampu mengembangkan pemasaran karet.

Asosiasi

Terdapat dua asosiasi karet di Provinsi Jambi yaitu Gapkindo dan Apkarindo. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo). Tujuan Gapkindo adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran karet alam Indonesia sebagai salah satu produk ekspor yang penting di Indonesia. Kenyataannya Gapkindo telah berperan dalam membangun karet di Indonesia. Anggota Gapkindo terdiri dari perkebunan karet (milik negara, swasta nasional maupun asing-modal), prosesor, eksportir, pedagang. Keberadaan Gapkindo memiliki peranan strategis dalam pengembangan Agribisnis karet. Meskipun aktivitas Gapkindo cenderung untuk

membela kepentingan industri pengolahan namun aktivitas Gapkindo juga memberikan kontribusi untuk mengembangkan Agribisnis karet secara keseluruhan. Aktifitas Gapkindo secara umum diantaranya adalah memberikan informasi harga indikasi karet ke masyarakat (Audina, 2022), mendukung pemerintah dalam program Gerakan Nasional Karet Indonesia, kampanye produksi Bokar Karet bersih (Yuningtyas, 2019), mewakili pemerintah di forum internasional, meningkatkan harga karet di tingkat internasional, dan branding karet Indonesia.

Hilirisasi Karet oleh Perusahaan

Produk olahan karet alam Indonesia lebih didominasi untuk menghasilkan RSS, SIR dan crepe. Lebih dari 90% produk-produk tersebut diekspor, kurang dari 5% yang diolah menjadi *final products* (Perdana, 2019). Sementara itu Thailand yang telah mengembangkan produk-produk akhir dari karet alam. Negara ini melalui Sri Tang (STA) Groups telah menghasilkan berbagai produk komponen kendaraan bermotor dari karet, sarung tangan dan berbagai produk akhir dari karet lainnya. Indonesia mengekspor lebih kurang 85 persen dari hasil produksi karetnya. Namun, di beberapa tahun terakhir tampak ada perubahan karena

jumlah ekspor sedikit menurun akibat meningkatnya konsumsi domestik (Ginting et al., 2018).

Pada kajian empiris penelitian ketiga perlunya peranan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan perusahaan perkebunan besar, perlu kembali digalakkan dan ditingkatkan. Peranan tersebut di sektor hilir dilakukan dengan mengembangkan sistem kemitraan antara perusahaan dan petani sehingga dihasilkan produksi karet dengan produktivitas yang tinggi dan kualitas yang baik. Disamping itu, dalam jangka pendek perusahaan-perusahaan dapat kembali meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara yang dihasilkan. Selanjutnya dalam jangka menengah dan panjang perusahaan didorong untuk secara bertahap mengembangkan industri hilir karet yang mampu menghasilkan produk-produk akhir yang bernilai tambah tinggi. Untuk itu, berbagai kemudahan dalam pengurusan administrasi usaha dan insentif pajak perlu diberikan pemerintah. Lembaga-lembaga penelitian harus digalakan untuk dapat menciptakan industri karet. Perlindungan ekspor dan optimalisasi pemanfaatan karet dalam negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Daya saing komoditi karet di Indonesia dalam perdagangan internasional tergolong

rendah. Kelembagaan petani sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani Terdapat tujuh kelembagaan utama yang mendukung agribisnis karet di Indonesia yaitu: Koperasi petani, lembaga pemerintah, UPPB, Penyuluh pertanian, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, Gapkindo (Gabungan Pengusaha Karet Indonesia) dan hilirisasi karet oleh perusahaan serta lembaga terkait. Kelembagaan penunjang tersebut satu sama lain saling terkait, dan masing-masing kelembagaan berfungsi saling mempengaruhi kelembagaan lainnya.

Saran rangkuman dari berbagai jurnal harus diperbanyak lagi agar strategi yang dirumuskan dapat lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y., & Rusdiyana, E. (n.d.). *Analisis Strategi Pemasaran Komoditas Karet Di Kabupaten Rokan Hulu*.
- Anantanyu, S. (2011). KELEMBAGAAN PETANI: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 7(2), 102–109.
- Antoni, M., & Tokuda, H. (2019). Identification of Obstacles and Drivers of Smallholder Rubber Farmers to Become Members of A Processing and Marketing Unit in Indonesia. *Applied Economics and Finance*, 6(2), 79–85. <https://doi.org/10.11114/aef.v6i2.393>

- Arifin dan M. Arsyad Biba. (2017). Pengantar Agribisnis. In *Muhajid Press* (1st ed., Issue August). Mujahid Press.
- Audina, M. (2022). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Integrasi Pasar dan Harga Karet di Tingkat Petani di Sumatera Selatan*.
- Bakce, D., Syahza, A., & Hamlin, N. (n.d.). *Strategi Pengembangan Industri Hilir Karet Alam di Provinsi Riau*. 1–21.
- Direktorat Jendral Perkebunan. (2021). Statistik perkebunan unggulan nasional 2019-2021. In D. Gartina & R. L. L. Sukriya (Eds.), *Direktorat Jenderal Perkebunan*. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Ginting, A. S., Puruhito, D. D., & Kurniawati, F. (2018). Analisis Ekspor Karet Indonesia. *Jurnal MASEPI*, 3(2), 1–15. <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007><https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023><http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>
- Hertina, S., Supli, N. A., Nisyak, K., & Program. (2021). Daya Saing Karet Alam Sumatera Selatan dalam Perdagangan Internasional. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 241–263. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.226>
- Hutahaean, M., Rosnita, & Yulid, R. (2016). Analisis Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Memberdayakan dan Memandirikan Petani Karet di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal JOM FAPERTA*, 3(2), 1–7. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Nurhamlin. (2018). Model Pembinaan Petani Perkebunan Karet Rakyat. *Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING)*, 407–426.
- Perdana, R. P. (2019). Kinerja Ekonomi Karet dan Strategi Pengembangan Hilirisasinya di Indonesia. *Jurnal 26 Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 37(1), 25–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/fae.v37n1>
- Prasetyo, W. (2017). Literature Review: Stres Perawat Di Ruang Instalasi Gawat Darurat. *Jurnal Ners Lentera*, 5(1), 43–55.
- Pratama, G. (2016). *Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Aropolitan Kecamatan Baros Kabupaten Serang*. Universitas Sultan Agung Tritayasa.
- Rosnita. (n.d.). *Motivasi dan kinerja penyuluh terhadap petani karet di kabupaten kampar*. 30.
- Santoso, A. (2018). Permasalahan Pengembangan Karet di Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(59), 6927–6944.
- Sutanto, Y., & Holqi, T. A. (2020). Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Petani Kopi dan Karet di BPP Kayuara Kota Lubuklinggau. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 4(2), 128–133.
- Syarifa, L. F., Agustina, D. S., Alamsyah, A., & Nugraha, I. S. (2016). Potensi Dan Kendala Dalam Penguatan Dan Penumbuhan Kelompok Pemasaran Bahan Olah Karet Terorganisir Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Karet*, 34(2), 237–246. <https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v34i2.228>
- Yuningtyas, C. V. (2019). *Integrasi pasar dan threshold transmisi harga karet alam indonesia dengan pasar internasional singapura*. Institut Pertanian Bogor.